



PUTUSAN KILAT MA BUKA JALAN KAESANG MAJI PILKADA

DETIL PUTUSAN

- Dalam putusan MA, pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 dinyatakan bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Aturan KPU diubah.
- Sebelumnya, bunyi pasal 4 ayat (1) huruf d: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.
- Namun aturan tersebut diubah oleh MA menjadi: Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih.
- Perubahan ada pada frasa 'terhitung sejak penetapan' menjadi 'terhitung sejak pelantikan'. (persingkat kalimat setiap point)

**Government (Hal.2)
Istana Umumkan
9 Nama Pansel KPK,
Dikritik karena
Dominasi Unsur
Pemerintah**

Jalan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 makin mulus. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) secara kilat--hanya dalam 3 hari-- mengubah aturan terkait batas usia calon kepala daerah. Kaesang, 29 tahun, sebelumnya tak bisa mendapatkan tiket untuk memperebutkan kursi kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. Diketahui dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU sebagai kandidat yang akan berlaga. Tapi setelah MA mengabulkan gugatan Partai Garuda, maka kini tak

harus berusia 30 tahun untuk bisa mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka yang baru berusia 30 tahun pada saat pelantikan dilakukan, bisa mencalonkan diri. Menurut jadwal, tahun ini KPU akan menetapkan calon kepala daerah pada 22 September 2024. Padahal Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Kebetulan atau memang sesuai skenario?

Baca di hal 11....

LIMA ALASAN MA MENGABULKAN PERMOHONAN PARTAI GARUDA

1. MA menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan keberatan hak uji materil terhadap objek permohonan.
2. MA meyakini Garuda mempunyai kedudukan hukum dalam pengajuan perkara itu.
3. MA memandang eksepsi yang diajukan KPU selayaknya dinyatakan ditolak.
4. MA menilai peraturan perundang-undangan yang menjadi objek hak uji materil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. MA memandang permohonan dari Garuda layak dikabulkan. "Pokok permohonan dari pemohon beralasan hukum, sehingga permohonan dikabulkan," tulis putusan MA.

Istana Umumkan 9 Nama Pansel KPK, Dikritik karena Dominasi Unsur Pemerintah

Struktur Pimpinan Pansel KPK Pilihan Jokowi:



Ketua:
Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak

Muhammad Yusuf Ateh, lulusan STAN dan University of Adelaide, pernah menjabat sebagai Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di Kementerian PAN dan RB. Ia memulai kariernya sebagai asisten dosen di STAN dan auditor BPKP sejak 1992. Pada 2020, Jokowi melantiknya sebagai Kepala BPKP.



Wakil:
Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSI

Arif Satria, Rektor IPB, menyelesaikan S1 hingga S2 di IPB dan S3 di Kagoshima University, Jepang. Berkari sebagai dosen di IPB, ia pernah meraih predikat Dosen Berprestasi III pada 2007. Kariernya mengantarkannya menjadi Rektor IPB dan Ketua Umum ICMI periode 2021-2026.



Anggota:
Dr. Ivan Yustiavandana, SH, LLM

Ivan Yustiavandana, yang bergabung dengan PPAK sejak 2003, pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Riset dan Analisis Non Bank serta Direktur Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan. Ia meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari UGM (cum laude) dan LL.M dari Washington College of Law, AS. Ivan dilantik sebagai Kepala PPAK pada 2021.



Anggota:
Nawal Nely, SE, MBA

Nawal Nely, Deputy Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN sejak 2020, pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait dan Senior Manager di Ernst & Young Egypt. Lulusan S1 Akuntansi UGM, ia meraih Executive MBA dari INSEAD.



Anggota:
Prof. Ahmad Erani Yustika, SE, MSc, PhD

Ahmad Erani Yustika, ekonom dan dosen Universitas Brawijaya, menyelesaikan S1 di Universitas Brawijaya serta S2 dan S3 di Georg August University Goettingen, Jerman. Ia menjabat sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden dan Komisaris PT Inalum.



Anggota:
Prof. Dr. Elwi Danil, SH, MH

Elwi Danil, ahli hukum pidana, pernah menjabat sebagai guru besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dari 2006 hingga 2010. Karena keahliannya, ia sering dihadirkan di persidangan sebagai saksi ahli.



Anggota:
Rezki Sri Wibowo, M.Sc.

Merupakan dewan pengurus Transparency International Indonesia (TII), sebuah chapter dari jaringan global NGO antikorupsi. Sebelumnya, ia bekerja sebagai bankir di Lippo Bank dan Niaga Bank, dan pernah menjabat sebagai Deputy Sekretariat Jenderal TII serta menjadi konsultan untuk perusahaan.



Anggota:
Taufik Rachman, SH, LLM, PhD

Taufik Rachman, anggota Pansel, adalah bagian dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di sana, S2 di University of La Trobe, Australia, dan meraih gelar Ph.D di Victoria University, Australia pada 2016.



Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh ketika berada di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. (ANTARA.Dok)

JAKARTA - Sebanyak 9 anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditetapkan.

Melihat komposisi yang ada, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM pesimistis. "Ya melihat konfigurasi nama-nama Pansel yang telah diumumkan pertama saya tidak punya banyak optimisme bahwa Pansel ini akan menghasilkan calon pimpinan KPK yang independen, bersih, berintegritas, profesional, dan mampu mengembalikan KPK dari keterpurukannya," kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada wartawan, Kamis (30/5/2024).

Diketahui, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh dipilih menjadi Ketua. Wakil ketuanya Arif Satria yang merupakan rektor IPB. Adapun anggotanya terdiri atas Ivan Yustiavandana, Nawal Nely, Ahmad Erani Yustika, Y. Ambeg Paramarta, Elwi Danil, Rezki Sri Wibowo, dan Taufik Rahman.

Rasa pesimisme itu bukan tanpa alasan. Zaenur melihat nama-nama di dalam Pansel itu lebih mengkomodir kepentingan pemerintah.

"Kenapa? Karena konfigurasi Pansel ini didominasi oleh unsur pemerintah sehingga yang lebih terlihat adalah kepentingan pemerintah daripada kepentingan masyarakat," ujarnya.

Dia menilai kepentingan pemerintah dan masyarakat belum tentu bisa sejalan. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, saat ini lebih mementingkan stabilitas, keamanan usai lengser mendarat.

"Itu terbukti berkali-kali bahwa Presiden Jokowi ini turut andil dalam kemunduran KPK," tegasnya.

Lebih lanjut, Zaenur berpendapat, konfigurasi Pansel itu mencerminkan keinginan Presiden untuk memilih calon pimpinan KPK yang dapat

menjamin keamanan pemerintah.

"Itu dibuktikan karena unsur pemerintahnya lebih banyak. Padahal seharusnya Pansel KPK itu didominasi oleh unsur masyarakat. Meskipun di dalam UU KPK itu tidak ditentukan jumlah unsur masyarakat dan pemerintah, tetapi KPK lembaga yang bersifat independen harusnya Panselnya independen," urainya.

Untuk menjawab keraguan publik, Zaenur kemudian menantang Pansel KPK untuk memberikan bukti nyata.

"Saya tidak berharap banyak kepada Pansel ini dan semoga harapan saya salah. Saya justru menantang Pansel untuk bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa Pansel itu tidak seperti yang saya katakan," pungkasnya.

Penjelasan Mensesneg

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan sembilan nama anggota panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

"Pak Presiden sudah menetapkan ketuanya adalah Muhammad Yusuf Ateh (ketua merangkap anggota), beliau Kepala BPKP," kata Pratikno di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani keputusan terkait penunjukan sembilan anggota panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK).

"Pansel KPK sudah saya tandatangani kemarin, sebelum berangkat sudah saya tandatangani, ada sembilan nama yang masuk tapi saya nggak hafal," kata Presiden Jokowi di sela kunjungan kerja di Sumatera Selatan, Kamis (30/5/2024).

"Jadi memang ketuanya ini dari

unsur pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Dewas KPK. Di situ disebutkan ketuanya (pansel) dari unsur pemerintah pusat," kata Pratikno.

Dia mengatakan secara keseluruhan anggota Pansel KPK ini berjumlah 9 orang terdiri dari 5 orang unsur pemerintah pusat dan 4 orang unsur masyarakat. Dia menyampaikan banyak pertimbangan yang diambil hingga nama-nama itu diputuskan.

Pratikno juga menyampaikan bahwa Pansel KPK akan bekerja secepatnya setelah Keputusan Presiden terbit.

"Kami akan mengundang beliau-beliau untuk segera bekerja," jelasnya.

Dia mengatakan sekretariat Pansel KPK akan berada di Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Deputy Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti akan bertugas sebagai sekretaris non-anggota.

"Nanti sekretaris non-anggota adalah Ibu Nanik (Nanik Purwanti) selaku Deputy Administrasi Aparatur Sekretariat Negara. Jadi beliau ini bukan anggota, sifatnya adalah mendukung memfasilitasi kerjanya panitia seleksi," kata Pratikno.

Pemerintah, kata Pratikno, berharap Pansel KPK dapat bekerja secara optimal dengan sebaik-baiknya untuk menentukan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang akan diusulkan ke DPR.

KPK juga sudah menanggapi soal nama-nama tersebut. "Kami berharap para pansel KPK terpilih dapat bekerja secara optimal dan independen dengan melepas kepentingan-kepentingan lain, selain kepentingan pemberantasan korupsi yang efektif ke depannya," kata juru bicara KPK melalui keterangannya, Kamis (30/5/2024).

Ali Fikri mengatakan pansel KPK sebaiknya memahami problematika dan tantangan pemberantasan korupsi saat ini, termasuk kebutuhan penguatan regulasi ataupun kelembagaannya, agar fungsi-fungsi pemberantasan korupsi bisa berjalan. "Pansel juga secara proaktif harus dapat menyerap berbagai saran, masukan, dan aspirasi masyarakat, sebagai pihak yang akan merasakan manfaat dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Sekaligus korban sesungguhnya dari praktik-praktik korupsi selama ini," kata Ali Fikri.

Dengan begitu, kata Ali Fikri, pansel KPK mampu melahirkan calon-calon pimpinan dan Dewas KPK yang memiliki rekam jejak dan komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, berintegritas, bebas dari konflik kepentingan, dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi. (wid,rls,ist/dya)

Penolakan Menguat, DPR Desak Presiden Jokowi Cabut PP Tapera



ulang karena memberatkan.

"Pemotongan 3 persen sangat memberatkan buruh dan kami mengusulkan Tapera tidak bersifat wajib. Kami usulkan bersifat opsional dan menjadi pilihan untuk bisa ikut atau tidak," timpalnya.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno mengatakan, buruh tidak pernah diajak dialog oleh pemerintah untuk membahas aturan ini.

Pun demikian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan tak sepekat bila karyawan dan pengusaha dibebani potongan gaji untuk Tapera

Dia mengungkapkan, sederet potongan gaji yang menjadi beban pendapatan kelas pekerja saat ini, dan membebani potongan pengusaha. Selama ini, pemberi kerja sebesar 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja. (wid,rls,ant/dya)

JAKARTA-Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan tengah menyiapkan aksi massa besar-besaran menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kalangan pengusaha juga dengan tegas menolak program tersebut.

Melihat hal itu, Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mendesak Presiden Jokowi menarik PP 21/2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang banyak penolakan.

"Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan pemerintah bisa merespons, karena itu peraturan pemerintah, Artinya reaksi publik harus didengar," kata Hero, sapaan akrab Herman Khaeron dalam diskusi bertajuk "Menelisik Untung-rugi Tapera" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Dia mengatakan, pemerintah harus memikirkan langkah-langkah teknis yang tepat, sesuai dengan kemampuan, daya beli masyarakat saat ini.

"Kalau ini kritiknya terhadap undang-undang, tentu DPR punya kewajiban untuk mengkaji, mengevaluasi, dan bisa saja berinisiatif untuk melakukan revisi," ucap Hero.

"Saya tidak mengatakan tidak setuju dengan peraturan pemerintah, tetapi semestinya ini yang harus dipertimbangkan (mencabut Tapera)," tambah politikus asal Cirebon, Jawa Barat itu.

Menurutnya, Tapera yang dikhususkan bagi pegawai perusahaan berpenghasilan rendah, hanya membuat rumit mereka. Karena itu tadi, banyak potongan. "Sudah penghasilan rendah, banyak potongan, ya makin rendah. Ini juga yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Regulasi mengenai Tapera diteken

Presiden Jokowi bertepatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2024. Di mana, PP 21/2024 merupakan perubahan revisi dari PP 25/2020 tentang Tapera.

Klasifikasi kelompok yang wajib mengikuti program tersebut, yakni ASN, TNI, Polri, pekerja BUMN/BUMD, serta swasta.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajiban-nya, dan memungut simpanan peserta dari pekerja.

Adapun besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri. Untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan masing-masing sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen, sedangkan Peserta Pekerja Mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan.

Peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Dana yang dihimpun dari peserta akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

Sebelumnya, Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menyerukan penolakan iuran Tapera. Karena buruh tak pernah dilibatkan dalam lahirnya PP 21/2024.

"Sudah berat gajinya dipotong sekarang tabungan buruh sudah gak ada, kami kecewa dan menolak ini. PP ini tidak pernah ada keterlibatan secara komunikasi dengan pekerja

buruh," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani medesak PP Tapera dikaji-

Subsidi Diprediksi Tembus Rp 83,08 T di 2025, Tarif Listrik Naik Juni?

JAKARTA-PT PLN (Persero) mengungkapkan subsidi sektor kelistrikan di Indonesia diprediksi akan mencapai Rp 83,08 triliun pada 2025. Isu perihal tarif listrik untuk pelanggan golongan non subsidi akan ada perubahan alias naik per 1 Juni 2024 pun mencuat.

Seperti diketahui, sejak beberapa bulan lalu pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menahan harga jual energi ke masyarakat, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun tarif listrik golongan pelanggan non subsidi, hingga Juni 2024 mendatang.

Lantas, apakah artinya per 1 Juni mendatang tarif listrik ini akan tetap sama atau akan ada perubahan?

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kebijakan penentuan tarif listrik merupakan otoritas dari pemerintah.

Yang pasti, Darmawan mengatakan, pihaknya akan terus menjalankan arahan yang diamanahkan oleh pemerintah terkait tarif listrik untuk bulan Juni 2024 mendatang.

"Bahwa otoritas untuk menentukan tarif ada di tangan pemerintah dan PLN siap menjalankan arahan dari pemerintah," ucapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Darmawan juga mengungkapkan pihaknya sudah melakukan analisis mendalam dengan Komisi VII DPR RI terkait penyaluran subsidi listrik ke seluruh wilayah Indonesia.

"Dalam tadi dengan Komisi VII (DPR RI) kami melakukan analisis secara mendalam bagaimana efektivitas dari penyaluran subsidi listrik untuk masyarakat yang tidak mampu," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik pada tahun ini. Namun, keputusan itu hanya berlaku sampai Juni 2024.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian



(Ilustrasi) Warga memeriksa meteran listrik prabayar sebelum diisi ulang di Jakarta. (Ist)

Airlangga Hartarto. Menurutnya, keputusan itu telah ditetapkan dalam sidang kabinet paripurna yang digelar Presiden Jokowi.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni, baik itu yang subsidi maupun non subsidi," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Dengan ketetapan itu, maka pemerintah menurut Airlangga telah menetapkan tambahan anggaran untuk Pertamina maupun PLN supaya tidak ada perubahan harga.

Namun, dia belum menjelaskan besaran perubahan anggaran subsidi energinya. Sebagaimana diketahui pada tahun ini target subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Rinciannya ialah Rp 113,3 triliun untuk subsidi BBM dan LPG, serta Rp 73,6 triliun untuk subsidi listrik.

Oleh sebab itu, ia mengatakan, defisit APBN akan melebar dari yang ditetapkan, 2,29% dari PDB pada tahun ini, menjadi sekitar 2,8%. Seiring dengan adanya penambahan kebutuhan anggaran untuk beberapa

pos anggaran.

Misalnya, penambahan subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun. Penambahan subsidi pupuk itu menurutnya untuk menyesuaikan kebutuhan riil petani 7-8 juta ton per tahun. Sebab, dengan anggaran subsidi pupuk yang saat ini Rp 26 triliun hanya cukup untuk 5,7 juta ton per tahun. "Kenapa subsidi pupuk ditambah karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahun. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton," ucap Airlangga.

"Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta," imbuhnya.

Selain itu, ia melanjutkan, juga ada program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan yang diarahkan untuk menekan tingginya harga beras senilai Rp 11,3 triliun.

"BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp 11 triliun," tutur Airlangga.

Dipengaruhi Minyak Dunia-Nilai Tukar

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, perkiraan subsidi listrik tersebut berdasarkan asumsi makro dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Asumsi harga minyak mentah nasional (ICP) pada 2025 diperkirakan US\$ 80 per barel, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (kurs) Rp 15.100 per US\$, dan inflasi di level 2,5%.

"Besaran subsidi listrik 2025 per golongan tarif adalah sebagai berikut, subsidi listrik sebesar Rp 83,08 triliun, ini menggunakan asumsi ICP, kurs, dan inflasi sesuai yang ada di RAPBN," tutur Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Detailnya, Darmawan mengungkapkan bahwa lebih dari setengah subsidi listrik tersebut atau sebesar Rp 53,96 triliun ditujukan untuk pelanggan rumah tangga yang mencapai 35,22 juta pelanggan.

"Dari besaran subsidi tersebut 64,95% atau Rp 53,96 triliun diperuntukkan pelanggan rumah tangga 35,22 juta pelanggan," tambahnya.

Selain itu, dia menjabarkan selain sektor rumah tangga, terdapat subsidi listrik untuk sektor sosial sebesar Rp 12,2 triliun pada 2,13 juta pelanggan, kemudian pada sektor bisnis sebesar Rp 9,4 triliun pada 4,29 juta pelanggan.

Lalu, sektor industri sebesar Rp 5,9 triliun untuk 0,24 juta pelanggan, dan pada sektor pemerintahan dan lainnya sebesar Rp 1,6 triliun pada 0,20 juta pelanggan. (wid,rls,ist/dya)

PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK INDONESIA

36.787 MW

2015

50.531 MW

2019

74.536 MW

2024

KEBUTUHAN LISTRIK DI INDONESIA

Rasio Elektrifikasi

99.4 Persen

Penduduk Indonesia

284.8 Juta

Pelanggan PLN

78.4 Juta

Pertumbuhan Kebutuhan Listrik

464.2 TWH

+ Tambahan Kapasitas 70.400 MW

Terbukti Kuntit Jampidsus, Anggota Densus 88 Tak Diberi Sanksi



ID BUMN palsu milik anggota Densus 88 yang menguntit Jampidsus Kejaksaan Agung. (Dok



Anggota Densus 88 penguntit Jampidsus. Foto: Dok. Istimewa

JAKARTA - Brigadir Polisi Dua atau Bripda Iqbal Mustofa diduga menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Febrie Adriansyah pada 19 Mei 2024. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan Iqbal telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri karena tindakan tersebut.

Namun hasil pemeriksaan disampaikan bahwa anggota Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 itu tidak bermasalah karena menguntit tersebut.

"Seandainya anggota melanggar etika, tindak pidana, tindakan disiplin, berarti Pak Kepala Divisi Propam akan menyampaikan hal serupa. Jadi hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah," kata Sandi di Mabes Polri, Kamis, (30/5/2024).

Iqbal sempat ditangkap ketika ketahuan menguntit di sebuah restoran Prancis wilayah Cipete, Jakarta Selatan. Dia bersama sejumlah rekannya diduga menguntit Febrie Adriansyah hingga ke dalam restoran. Namun hanya Iqbal yang berhasil ditangkap Polisi Militer yang mengawal Febrie.

Sandi tidak menjelaskan motif atau alasan anggota Densus 88 menguntit petinggi Kejaksaan Agung tersebut, termasuk pemberi perintah untuk Iqbal. Dia pun menganggap semua persoalan ini sudah selesai, meskipun masih banyak kejanggalan. "Tidak ada permasalahan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian," tuturnya.

Perwira tinggi Polri tersebut mengambil kesimpulan setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga berkata hal yang sama saat di Istana Negara pada 27 Mei 2024. Saat itu keduanya juga sempat bersalaman, lalu digandeng oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.

"Pemimpin kalau menyampaikan tidak ada masalah, kenapa harus dipermasalahkan?" ucap Sandi Nugroho.

Sebelumnya, Kejagung membenarkan adanya peristiwa penguntitan yang dilakukan anggota Densus terhadap Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

"Bahwa memang benar ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung, Rabu (29/5/2025).

Ketut menjelaskan, saat kejadian, pihak pengawasan Febrie langsung mengamankan anggota Densus tersebut. Pengeledahan juga dilakukan.

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ternyata di dalam hp yang bersangkutan itu ditemukan profiling daripada Pak Jampidsus," beber Ketut.

Pengamat: Ada Motif Kepentingan

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menduga bungkamnya kedua institusi penegak hukum tersebut karena ingin menutupi sesuatu yang sifatnya kepentingan pribadi atau kelompok.

"Yang sangat mungkin motifnya pribadi atau kelompok. Jika kepentingannya kepentingan dinas,

maka sebenarnya bisa dilakukan secara terbuka dan formal (resmi) dengan memanggil dan meminta keterangan dari jaksa yang dikuntit," ucap Abdul kepada Media Indonesia, Kamis (30/5/2024).

Dengan dilakukannya penguntitan, yang mana hal itu tidak secara resmi dilakukan permintaan keterangan, Abdul menegaskan motifnya diragukan sebagai motif dinas untuk kepentingan umum.

"Saya kira ini harus ditertibkan oleh Kapolri, jangan sampai status densus disalahgunakan secara pribadi baik untuk kejahatan atau kepentingan oknum atasan tertentu atau kejahatan lainnya," pesan Abdul.

Abdul juga menduga kuat aksi penguntitan itu ada kaitannya dengan kasus yang tengah ditangani oleh Jampidsus Febrie Adriansyah. Karena itu, Kapolri harus segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

"Jika tidak ada penjelasan secara terbuka, seolah-olah ada pejabat Polri yang terlibat kasus yang kemudian mengerahkan densus," ujar Abdul.

Dia juga menduga-duga apakah benar telah terjadi gesekan antarpejabat pengusaha dengan penegak hukum yang menangani korupsi, terutama dalam kasus kasus yang ditangani Kejagung.

"Mestinya siapa pun yang terlibat harus diproses termasuk mereka pejabat publik yang membekingi baik yang msh aktif maupun yang purnawirawan. Supaya mereka sadar zaman sudah berubah dan sudah bukan zamannya bisnis-bisnis yang ilegal," pungkasnya. (wid,ist,ant/dya)

FAKTA-FAKTA KASUS ANGGOTA DENSUS 88 KUNTIT JAMPIDSUS:

1. Identitas Anggota Densus 88 yang Kuntit Jampidsus

Berdasarkan pemeriksaan diketahui identitas anggota Densus 88 yang menguntit Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah bernama Bripda Iqbal Mustofa.

2. Lolos dari Sanksi

Bripda Iqbal telah dibebaskan dan tidak dikenakan sanksi. Ini sesuai dengan hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri yang menyatakan tidak ada masalah.

3. Polri Tak Ungkap Motif

Polri enggan membeberkan motif penguntitan oleh anggota Densus 88 tersebut.

4. Melakukan Profiling

Kejagung menemukan fakta bahwa Bripda Iqbal telah memprofilkan Jampidsus. Saat penguntitan, Bripda Iqbal memotret Febrie.

5. Nyamar Jadi Karyawan BUMN

Iqbal sempat menyamar menjadi karyawan BUMN saat menguntit Jampidsus. Hal ini dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana

Disnaker Sebut Gen-Z Enggan Cari Kerja di Luar Malang Raya

MALANG - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Malang mengungkap salah satu tantangan dalam mengatasi tingginya angka pengangguran di kalangan Gen-Z. Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, mayoritas generasi ini enggan mencari pekerjaan di luar wilayah Malang Raya.

"Kapan hari sempat kita melakukan pelatihan tata kecantikan, tata rambut. Setelah itu, kita dihubungi dari salah satu penyedia jasa di Bali, di Batam melalui kepala bidang kami. Kita tawarkan ini ada lowongan, mereka (Gen-Z) bilang gak mau kalau di luar Malang Raya. Mereka maunya kerja di Malang," ujar Arif, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (30/5/2024).

Sementara itu, diketahui berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, mengungkapkan bahwa hampir 10 juta penduduk Gen-Z berusia 15-24 tahun diketahui menganggur atau tanpa kegiatan.

Data ini juga menunjukkan, jumlah Gen-Z yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak menjalani pelatihan (NEET) terbanyak terdapat di daerah perkotaan, mencapai 5,2 juta orang,

sementara 4,6 juta orang berada di pedesaan.

Menyikapi masalah ini, Arif mengaku telah mengambil langkah dengan meminta data yang komprehensif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukapil). Dengan harapan, data tersebut dapat digunakan untuk menyusun program-program pelatihan yang tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan Gen-Z di Malang Raya.

Selain itu, Arif menyebutkan, Disnaker Kota Malang juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pengusaha di Kota Malang, seperti restoran dan toko modern, untuk memperluas peluang kerja bagi Gen-Z.

"Lowongan kerja pasti kami post di medsos kita. Makanya kami juga mengimbau agar teman-teman Gen-Z supaya sering melihat instagram Disnaker PMPTSP Kota Malang," tukasnya.

Sementara itu, salah satu Gen-Z di Kota Malang, Fatma (24), mengaku memiliki keinginan untuk bekerja, namun dengan syarat tertentu. Fatma mengaku lebih memilih untuk tetap berada di Malang Raya. Alasannya sederhana,



karena ia merasa lebih nyaman berada di dekat keluarga.

Menurut Fatma, selain ekonomi, pertimbangan emosional dan sosial sangat memengaruhi pilihan Gen-Z dalam mencari pekerjaan di luar

wilayah Malang Raya. "Soalnya kalau di luar kota kan harus jauh dari keluarga, mikir biaya hidupnya bagaimana. Itu aja sih, lebih ke gak siap kalau harus jauh dari keluarga," tuturnya. (Santi/dya)

PAD Kota Batu Tembus 24,27% Per April 2024, Pajak Hotel Mendominasi

BATU - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu per akhir April 2024 tembus 24,27 persen dari target Rp 281,2 miliar. Pajak Hotel mendominasi sebagai penyumbang terbesar, mengungguli sektor-sektor lainnya..

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Zadim Effisiensi, mengonfirmasi, kontribusi terbesar terhadap PAD di triwulan I 2024 ini berasal dari Pajak Hotel, yang mencapai Rp 15,8 miliar atau 35,68 persen dari target Rp 44,5 miliar.

Selanjutnya disusul oleh pendapatan Pajak Restoran dengan realisasi sebesar Rp 12,6 miliar dari target Rp 31,9 miliar, dan diikuti oleh Pajak Hiburan yang mencapai Rp 13,5 miliar dari target Rp 41,6 miliar.

"Tingginya realisasi PAD dari sektor Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan dipengaruhi oleh lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Lebaran," ungkap Zadim, Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan selama libur Idul Fitri pada 8-17 April



2024 lalu, telah mencapai 456.223 orang.

Zadim menambahkan, kunjungan wisatawan yang tinggi tersebut menjadi faktor utama tingginya penerimaan dari Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan.

"Kami optimistis, realisasi PAD dari ketiga sektor ini akan terus meningkat, terutama dengan adanya

libur panjang akhir pekan di bulan Mei, dan libur Idul Adha di Juni mendatang," tambahnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan target PAD dapat tercapai maksimal menjelang triwulan II, Zadim meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk proaktif memaksimalkan potensi yang ada. "OPD penghasil harus jempot bola,

memaksimalkan pendapatan di sektor pajak dengan turun langsung ke hotel, restoran, tempat wisata, serta retribusi parkir di tepi jalan," tegasnya.

Zadim juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan PAD, guna mencegah kecurangan. Menurutnya, Pemkot Batu senantiasa mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pihak-pihak yang melanggar peraturan daerah.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman, menyoroti pentingnya pengawasan pada Pajak Restoran dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan yang dinilai rawan kecurangan.

Menurutnya, PAD Kota Batu harus dimaksimalkan, namun perlu penekanan pada sektor yang rawan kecurangan seperti Pajak Restoran. "Karena kerap kali terjadi restoran penuh tetapi pajak yang dilaporkan tidak masuk akal. Begitu juga dengan parkir di tepi jalan yang harus segera dipihak ketigakan agar retribusi mencapai target sesuai kajian," tegas Nurochman. (Santi/Dya)

IQBAAL RAMADHAN

dan Fakta-fakta Sepanjang Kariernya

MUSISI sekaligus aktor asal Indonesia, Iqbaal Ramadhan, secara resmi membuka saluran khusus di WhatsApp dengan nama akun BAAL yang menjadi tempat khusus bagi dia membagikan bocoran karya dan kegiatannya kepada penggemar.

Saluran resmi Iqbaal di WhatsApp itu sebenarnya telah ada sejak 17 April 2024, dalam waktu hampir satu minggu kini saluran tersebut telah diikuti oleh 81 ribu penggemar sang bintang.

Dalam keterangan resmi WhatsApp, pria yang dikenal berkat perannya menjadi Dilan di "Dilan 1990" itu sudah beberapa kali membagikan kegiatannya secara aktif bahkan memberikan pengumuman eksklusif tentang perjalanan musik barunya.

Dunia drama musikal mengantarkan Iqbal CJR terjun ke dunia hiburan. Mulai menjadi penyanyi grup Coboy Junior hingga menjadi artis sinetron dan film.

Iqbaal Dhiafikri Ramadhan, yang biasa di panggil Iqbaal CJR merupakan seorang penyanyi dan artis yang mulai populer pada 2010.

Saat itu usianya menginjak 11 tahun. Iqbaal bergabung di grup boy band Coboy Junior, bersama Kiki, Bastian, dan Aldi.

Setelah Bastian hengkang dari Coboy Junior, Iqbaal, Kiki, dan Aldi tetap melanjutkan karier bermusiknya dengan nama baru, yaitu CJR.

Nama boy band itu diganti bukan hanya karena Aldi hengkang, tapi juga karena mereka tidak junior lagi dan sudah beranjak dewasa. Meski demikian nama CJR tak lepas dari singkatan Coboy Junior.

Sebelum bergabung dengan grup Coboy Junior, Iqbaal memulai kariernya di panggung drama musikal Laskar Pelangi sebagai Trapani.

Di situlah, ia bertemu dengan produser Coboy Junior dan menjadi vocal grupnya.

Namanya mulai populer. Iqbaal dan Coboy Junior merilis dua single, yaitu Kamu dan Eaaa. Coboy Junior juga merilis dua album, dua sinetron, dan film terkait grup bandnya.

Iqbaal dan Coboy Junior juga membintangi sinetron berjudul Coboy Junior: Hanya Kamu dan Coboy Junior :

Hanya Kamu #eaaa 2. Sinetron ini disiarkan dari 11 Juni 2012 - 11 Oktober 2012.

Sementara dua film berjudul Coboy Junior The Movie pada 2013. Satu lagi terkait pergantian nama bandnya dengan judul CJR The Movie yang tayang 2015, bertepatan usianya 16 tahun.

Semakin dewasa, Iqbaal juga memerankan kisah lainnya yang tak ada hubungannya dengan bandnya. Ia memerankan karakter Dilan dalam film Dilan yang diambil dari novel garapan Pidi Baiq rilis pada bulan Januari 2018.

Penyanyi dan aktor kelahiran Surabaya, 28 Desember 1999 ini memang mempunyai banyak penggemar, lebih dari personil-personil CJR lainnya.

Namanya makin terkenal setelah ia merilis album solonya, bernama SoniQ dengan delapan lagu. SoniQ atau Sobat Iqbaal adalah nama panggilan untuk fans Iqbaal.

Selain suaranya, ketampanan Iqbaal memesona. Ia terkenal dengan rambutnya yang ditata seperti idolanya Justin Bieber. Kawat giginya membuatnya terlihat manis di mata penggemar-penggemarnya.

Begitu juga gaya berpakaian Iqbaal yang terinspirasi dari idolanya tersebut. Bahkan kemeja dan topi-topi yang selalu dia pakai setiap tampil di atas panggung mirip dengan sang pujaannya.

Di tengah hingar bingar dunia hiburan, anak dari pasangan Herry Hernawan dan Rike Dhamayanti ini masih peduli akan pendidikannya meskipun ia sudah meraih kesuksesan.

Ia memutuskan untuk vakum dari grup band CJR setelah terpilih untuk masuk ke Armand Hammer United World College di Amerika Serikat, tepatnya Montezuma, New Mexico. Para penggemarnya pun bersedih saat mengetahui Iqbaal akan vakum dan akan jarang tampil off air maupun on air karena melanjutkan studinya di negeri Paman Sam.

Namun, banyak juga langkah yang diambil Iqbaal mendapatkan respon

postif dari para fansnya. Iqbal yakin dengan pendidikan seseorang akan memiliki karakter yang diperlukan dalam profesi apapun.

Sayang, kisah band CJR yang sudah berdiri selama 6 tahun berakhir bubar. Pada 4 Desember 2017, akun resmi CJR mengumumkan berakhirnya masa kebersamaannya. Para penggemarnya pun menjerit histeris.

Bakat aktingnya pernah diragukan, dan ia berhasil menjawab keraguan semua orang dengan berperan dalam film Dilan 1990 yang terinspirasi dari novel best seller karya Pidi Baiq itu. Ia bahkan mendapat banyak pujian atas perannya tersebut (Antara/Viva)



ANJURAN PEMBERIAN MAKANAN PROTEIN HEWANI PADA ANAK

AHLI gizi menganjurkan pemberian makanan sumber protein hewani yang mengandung asam amino esensial pada anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal mereka.

"Meskipun manusia dapat memperoleh protein yang bersumber dari protein nabati, namun protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap," kata guru besar bidang ilmu gizi kesehatan masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, MPH, di Jakarta.

Bahan makanan yang termasuk sumber protein hewani antara lain ikan, cumi-cumi, udang, kerang, telur, susu, daging unggas, dan daging sapi.

"Makanan tersebut setidaknya menyuplai sembilan macam asam amino esensial dari 20 jenis asam amino atau senyawa yang bergabung untuk membentuk protein yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain pertumbuhan fisik juga pertumbuhan otak," kata Sandra.

Namun demikian, ia mengatakan, hasil survei menunjukkan bahwa penduduk Indonesia lebih banyak mengonsumsi protein nabati (65,7 persen) ketimbang protein hewani (34,3 persen).

Dia mengutip hasil survei tahun 2020 yang menunjukkan rata-rata konsumsi protein hewani penduduk perkotaan 23,71 gram per kapita per hari, sedangkan penduduk perdesaan 18,21 gram per kapita per hari.

Protein hewani yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia di perdesaan dan perkotaan dalam satu tahun rata-rata 21,29 gram per kapita per hari menurut hasil survei itu.

Sandra mengatakan bahwa jika dibandingkan pada tahun 2020, tingkat konsumsi daging pada 2022 mengalami peningkatan meski tidak signifikan.

Menurut dia, tingkat konsumsi daging sapi dan unggas juga masih lebih baik dari tingkat konsumsi ikan, cumi-cumi, udang, dan kerang yang stagnan serta tingkat konsumsi telur dan susu yang menurun selama kurun itu.

Fikawati memaparkan data dalam Buletin Konsumsi Pangan Vol 13 Nomor 1 Tahun 2022 dari Kementerian Pertanian yang menunjukkan penduduk Indonesia lebih banyak mengalokasikan pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi (31,74 persen) dibandingkan untuk daging (4,38 persen), ikan/udang/cumi-cumi/kerang (7,72 persen), serta telur

dan susu (4,99 persen).

Menurut dia, data-data tersebut menunjukkan peluang bagi produsen makanan untuk menawarkan bahan makanan segar, seperti daging segar, sebagai pilihan sumber protein hewani.

Cegah stunting

Konsultan Nutrisi Anak dan Penyakit Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak RS Dr Soetomo Dr Nur Aisyah Widjaja SpA (K) mengingatkan pentingnya asupan protein hewani untuk cegah stunting.

"Terutama anak memasuki masa Makanan Pendamping ASI (MPASI), yang mana orang tua perlu memperhatikan asupan protein hewani pada anak," ujar Nur dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 21,6 persen.

Meski telah mengalami penurunan dari 24,4 persen pada 2021, namun angka prevalensi stunting ini masih belum memenuhi standar WHO yang semestinya tidak lebih dari 20 persen.

P e m e r i n t a h I n d o n e s i a menargetkan penurunan stunting hingga ke angka 14 persen pada 2024.

Dia menjelaskan bahwa 60,6 persen stunting terjadi antara lahir sampai usia dua tahun, dan 28 persen terjadi antara usia dua hingga lima tahun.

Dia menjelaskan saat anak berusia 6 hingga 8 bulan, kandungan gizi ASI berkurang 30 persen, lalu pada usia 9-11 bulan berkurang lagi hingga 50 persen, dan selanjutnya terus berkurang hingga 70 persen. Kandungan zat gizi mikro seperti zat besi dan zink di dalam ASI juga mengalami penurunan hingga 95 persen - 97 persen setelah anak berusia 6 bulan.

Stunting banyak dimulai saat anak mengalami penurunan berat badan pada usia kurang dari satu tahun dan kekurangan gizi kronis.

Untuk meningkatkan kualitas MPASI, langkah penting yang dapat dilakukan adalah meningkatkan konsumsi protein hewani. Mencukupi asupan protein hewani dipercaya efektif untuk mencegah kondisi stunting pada anak. Konsumsi protein hewani seperti telur, daging sapi, daging ayam, ikan, susu, dan sebagainya, mengandung lebih banyak lemak, vitamin B12, vitamin D, DHA, zat besi, dan zink yang diperlukan anak untuk mendukung pertumbuhan anak (Antara)



"Makanan tersebut setidaknya menyuplai sembilan macam asam amino esensial dari 20 jenis asam amino atau senyawa yang bergabung untuk membentuk protein yang dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain pertumbuhan fisik juga pertumbuhan otak,"

Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, MPH,

REKOMENDASI KAMERA MIRRORLESS ENTRY LEVEL TERBAIK



KAMERA mirrorless adalah jenis kamera digital yang menggunakan electronic viewfinder (EVF) atau layar LCD untuk mengkomposisikan foto, bukan penta prisma atau cermin reflektif seperti pada DSLR.

Kelebihan utama kamera mirrorless adalah ukurannya yang lebih kecil, bobot yang lebih ringan, dan portabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan DSLR.

Namun, kekurangan utama adalah daya tahan baterai yang lebih rendah dan harga yang biasanya lebih tinggi.

Saat memilih kamera mirrorless, penting untuk mempertimbangkan fitur yang dibutuhkan dan budget yang tersedia. Berikut adalah beberapa rekomendasi kamera mirrorless entry level terbaik yang bisa kamu pertimbangkan:

1. Fujifilm X-T100

Fujifilm X-T100 adalah pilihan ideal bagi pemula yang menginginkan kamera dengan kemampuan merekam video berkualitas 4K pada 15 FPS.

Kamera ini memiliki desain yang ringkas dengan sensor APS-C beresolusi 24,2 megapiksel dan kemampuan continuous shooting hingga 6 FPS.

Kamera ini dilengkapi dengan EVF yang indah dan LCD artikulasi terbaik di kelasnya. Meskipun buffer-nya cepat terisi saat memotret dalam format RAW, kamera ini tetap layak dipertimbangkan dengan harga sekitar Rp7.200.000.

2. Canon EOS M50

Canon EOS M50 adalah kamera

mirrorless entry level dengan fitur lengkap yang memudahkan fotografer pemula. Kamera ini memiliki sensor APS-C beresolusi 24,1 megapiksel dan EVF dengan 2.360.000 titik.

Kamera ini juga mampu merekam video 4K meskipun dengan crop dan bukan full frame. Dengan harga sekitar Rp8.699.000, Canon EOS M50 menawarkan berbagai fitur yang berguna bagi pemula.

3. Olympus OM-DE-M10 Mark III

Olympus OM-D E-M10 Mark III memiliki desain klasik yang mengingatkan pada kamera SLR retro. Kamera ini menggunakan sensor Micro Four Thirds beresolusi 16,1 megapiksel dan dilengkapi dengan lensa M.Zuiko Digital ED 14-42mm yang serba guna.

Meskipun resolusi kamera ini lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya, kualitas gambar yang dihasilkan tetap impresif. Kamera ini sekarang dibanderol dengan harga sekitar Rp6.350.000.

4. Sony Alpha A5100

Sony Alpha A5100 adalah pilihan ideal bagi fotografer pemula dengan fitur di atas rata-rata. Kamera ini memiliki layar yang bisa diputar hingga 180 derajat, cocok untuk penggemar selfie dan vlogging.

Dengan harga terjangkau sekitar Rp5.500.000, Sony Alpha A5100 menawarkan teknologi kamera canggih dan kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan populer di kalangan content creator. (TimeNews)



WISATA DI SOLORAYA BISA PAKAI HELIKOPTER

BAKAL ada hal baru dalam hal pariwisata di Soloraya, bagaimana tidak wisatawan bisa mengikuti tour menggunakan helikopter.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta berencana mengembangkan helitour untuk mengeksplorasi potensi wisata daerah sekitar Solo, Jawa Tengah.

Jika program ini berjalan, maka wisatawan bisa menyewa helikopter untuk mengeksplorasi Soloraya yakni Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten, sering disebut juga sebagai eks-Karesidenan Surakarta.

"Kami punya program baru, yaitu helikopter untuk Solo Raya, jadi menyewa helikopter untuk berwisata di Solo Raya," kata Ketua Kadin Kota Surakarta Ferry Septha pada pembukaan kegiatan Solo Investment And Public Service Expo dan BUMN UMKM Great Sale di Solo, Kamis.

Konsep helitour ini memang bukan kali pertama ada. Feery mengatakan bahwa wisata udara tersebut sudah ada di Bali dan ke depan Solo segera mengikutinya.

"Ada wahana itu, masyarakat Solo dan sekitarnya silakan kalau ingin merasakan sensasi baru. Kami ingin memantaskan diri baik di darat maupun udara," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia Solo Great Sale (SGS) yang juga pengurus Kadin Kota Surakarta Daryono mengatakan hinterland Solo bukan hanya Solo Raya tetapi juga daerah lain.

"Dulu 15 tahun lalu hanya meliputi enam kabupaten. Ke depan bisa mencakup Grobogan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Salatiga. Ini jadi hinterland Solo dan Soloraya," katanya. Dengan pengembangan wisata tersebut, diharapkan destinasi Solo Raya bisa lebih terangkat.

Ia mengatakan para wisatawan bisa menikmati berbagai infrastruktur yang sudah dibangun oleh Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

"Stadion Manahan, Masjid Sheikh Zayed, Taman Balekambang, Keraton Kasunanan Surakarta, Solobaru, dan Colomadu," katanya. Terkait hal itu, Gibran mengatakan mendukung

penuh kegiatan tersebut.

"Kami mendukung inovasi dan hal baru yang bisa meningkatkan pariwisata di Solo. Ini kerja sama di Solo Raya, jadi ditunggu saja," katanya.

Demak

Sebelumnya melalui jasa layanan transportasi udara Heli Jateng yang ada di lokasi wisata Degega Demak.

Sarana transportasi tersebut menjadi salah satu layanan wisata udara yang dikelola PT Rudi Jaya Prasetyo (RJP).

Dengan helipad atau landasan helikopter di Objek Wisata Degega, Mijen Demak, semakin menguatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut.

Peluncuran layanan wisata helikopter ini ditandai dengan penerbangan perdana oleh Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE bersama suami dr M Zaki Ma'ardi disaksikan sejumlah pecinta objek wisata dari berbagai daerah.

Direktur PT RJP, Wulan Rudi Prasetyo mengatakan, layanan helikopter yang ia sebut sebagai Helly Jateng tersebut merupakan satu-satunya layanan wisata udara yang ada di Jateng.

Dengan tarif Rp 2.250.000 per 10 menit, wisatawan akan dibawa keliling objek wisata Degega dan berjalan hingga Alun-alun Demak.

Sepanjang perjalanan dapat menikmati panorama dan pesona alam di Kota wali.

"Ada dua unit helikopter yang tersedia dengan kapasitas masing-masing untuk 4 penumpang."

"Kami juga melayani kebutuhan transportasi udara lain, misal kunjungan kerja, pengantaran layanan emergency seperti untuk keperluan medis, pantauan udara maupun penyewaan," terangnya.

Helly Jateng diakui sebagai inovasi yang bisa menghubungkan wisata di Kabupaten Demak, Semarang dan sekitarnya dengan Karimunjawa yang menjadi destinasi favorit wisatawan.

Seusai jalan-jalan dengan helikopter, Bupati Demak Eisti'anah mengaku senang dapat melakukan pantauan wilayahnya dari udara (Bisnis/SM)



Putusan Kilat MA ... (dari Hal 1)

MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) Ahmad Ridha Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dalam amar putusannya, Ma mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.

Pada waktu yang bersamaan, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mendorong Budisatrio Djiwandono dan Kaesang Pangarep maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Keduanya diduetkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Hal ini terlihat dari foto yang diunggah Dasco melalui Instagram pribadinya pada kemarin, Rabu malam. "Budisatrio Djiwandono - Kaesang Pangarep For Jakarta 2024," tulis Dasco.

Adapun Budi Djiwandono dan Kaesang Pangarep merupakan representasi dari dua tokoh politik Indonesia saat ini, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi. Budi merupakan keponakan Prabowo, sementara Kaesang Pangarep merupakan putra bungsu Jokowi.

Mendasar pada aturan MA saat ini, Kaesang bisa memenuhi syarat usia sebagai calon kepala daerah di level provinsi. Hal ini lantaran amar putusan Mahkamah Agung yang memperlulus tafsir batas usia minimal 30 tahun terhitung setelah pelantikan calon, bukan sejak penetapan.

Pada hal, putra bungsu Jokowi yang lahir pada 25 Desember 1994 itu belum genap berusia 30 tahun saat pendaftaran nanti. Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dibuka pada 27-29 Agustus mendatang.

Jika berkaca pada pilpres 2024 lalu, Kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, yang masih berusia 36 tahun pada akhirnya bisa maju sebagai calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi menambahkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah syarat usia capres-cawapres sehingga seseorang yang belum berusia 40 tahun asal punya pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat lain yang dipilih melalui pemilu dapat mencalonkan diri dalam gelaran pilpres.

Sebagai informasi, MA dalam putusannya juga memerintahkan kepada KPU mencabut Pasal 4 ayat

(1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Adapun Partai Garuda memasukkan permohonan uji materi soal syarat usia kepala daerah ke MA pada 23 April 2024. Permohonan itu didistribusikan pada 27 Mei 2024.

Permohonan itu diputuskan tiga hari setelah didistribusikan. Sidang itu dipimpin oleh ketua majelis Yulius, serta dua anggotanya, Cerah Bangung dan Yodi Martono Wahyunadi.

Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengungkapkan alasan hakim mengeluarkan putusan soal syarat minimal usia calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur yang terbilang singkat.

Suahrto berdalih hal itu telah sesuai dengan asas pengadilan yang ideal. Suharto mengatakan pengadilan seharusnya dilaksanakan dengan cepat dan sederhana.

"Sesuai asas yang ideal itu yang cepat karena dasarnya pengadilan di laksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi cepat itu yang ideal," kata Suharto, Kamis (30/5/2024).

Partai Nasdem mengkritik putusan MA ini. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto berharap putusan MA tidak dijadikan alat untuk memuluskan karier politik golongan tertentu.

"Menurut kita, enggak usahlah saling semuanya, 'mengakali aturan'," ujar Sugeng di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Sementara itu, juru bicara PDIP, Chico Hakim, mengatakan hukum saat ini kembali digunakan untuk meloloskan sosok tertentu. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pemimpin tanpa kemampuan akan maju.

"Kembali lagi 'hukum diakali oleh hukum' demi meloloskan putra penguasa maju sebagai calon," kata Chico dalam keterangannya, Kamis (30/5/2024).

"Negeri ini terus dipaksa mengakomodir pemimpin pemimpin tanpa pengalaman, tanpa rekam jejak yang jelas, yang minim prestasi dan belum cukup umur," tambahnya.

Tak Elok Diberlakukan Tahun Ini

Sementara itu, pengamat hukum pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini menilai tidak elok jika putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia kepala daerah diberlakukan di tahun ini. Sebab, putusan itu dikeluarkan di tengah proses tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan.

"Putusan MA soal penghitungan usia calon gubernur terhitung minimal 30 tahun saat pelantikan, tidak bisa diberlakukan pada Pilkada 2024. Sebab tahapan pencalonan sudah berlangsung dengan calon perseorangan yang sudah menyerahkan syarat dukungan,

dan sedang dilakukan verifikasi administrasi," kata Titi dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Adapun sinyal sudah berjalannya tahapan Pilkada 2024, tutur dia, adalah sudah diteruskannya syarat dukungan bagi calon perseorangan. "Artinya, rangkaian proses pencalonan jalur perseorangan dilakukan dengan keberlakuan syarat usia yang masih menggunakan ketentuan berusia paling rendah 30 tahun untuk cagub atau cawagub, dan 25 tahun untuk calon di Pilkada kabupaten atau kota 'terhitung sejak penetapan pasangan calon'," ujar Titi

Analisis Politik, Adi Prayitno, mengatakan dengan adanya putusan ini, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep memiliki peluang besar untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur atau wakil gubernur.

Namun, kata dia, dengan kapasitas Kaesang yang saat ini berstatus sebagai ketua umum partai, putra presiden, serta adik dari wakil presiden terpilih, pelik rasanya Kaesang tak memanfaatkan peluang ini. "Dan lebih lucu jika benar maju tapi jadi hanya wakil gubernur," kata Adi saat dihubungi, Kamis, 30 Mei 2024.

Kaesang, menurut dia, memang tidak memiliki cukup pengalaman dalam urusan pemerintahan. Namun, elektabilitas dan popularitasnya cukup mendukung untuk maju di palagan Pilkada. "Dia representasi anak muda. Juga berdampak efek ekor jas Presiden Jokowi," ucap Adi.

Dihubungi terpisah, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan Kaesang dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan pilkada di Jakarta.

Menurut Ujang, efek ekor jas juga akan berdampak pada Budisatrio, mengingat statusnya sebagai keponakan Prabowo Subianto. "Apalagi unggahan poster yang hari ini viral sukses untuk membuat keduanya jadi perbincangan," kata Ujang.

Di sisi lain, Peneliti Populi Center, Usep Saepul Ahyar berpendapat, majunya Gibran ke Pilkada Jakarta dengan memanfaatkan putusan Mahkamah Agung bakal berdampak pada meningkatnya sentimen negatif terhadap keluarga Solo-keluarga Presiden Jokowi. "Ini sama saja melanggengkan dinasti politik," ujar Usep.

Saat Putusan MA ditanyakan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), dia memilih menjawab singkat

"Itu tanyakan ke Mahkamah Agung, atau tanyakan ke yang gugat," kata Jokowi usai meninjau Pasar Bukit Sulap Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Kamis (30/5/2024).

Saat ditanya apakah Jokowi sudah membaca putusan tersebut,

ia menjawab belum. "Belum, belum, belum," ujarnya.

Terpisah, Wakil presiden terpilih 2024 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai Kaesang Pangarep masuk bursa Pilgub Jakarta dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Gibran meminta agar keputusan Kaesang maju dalam perhelatan Pilgub Jakarta ditanyakan kepada PSI.

"Ya keputusan di Kaesang untuk maju atau tidak. Tanyakan saja ke teman-teman PSI," ujar Gibran saat ditemui di Taman Balekambang, Kamis (30/5/2024).

Disinggung mengenai putusan MA tersebut apakah membuka peluang bagi anak muda, Gibran tidak menampik hal itu. "(Kesempatan anak muda) Ada, terbuka luas untuk semua," ujarnya. (wid,rls,ist,ant,tmp/dya)

**DINASTI POLITIK
PRESIDEN DI RI**



**KELUARGA
JOKOWI:**

- Gibran Rakabuming Raka: Walikota Solo
- Bobby Nasution: Walikota Medan
- Kaesang Pangarep: Ketua Umum PSI
- Anwar Usman: Ketua Mahkamah Agung



**KELUARGA
SOEKARNO:**

- Soekarno: Presiden pertama Indonesia
- Megawati Soekarnoputri: Presiden kelima Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrat Indonesia-Perjuangan
- Rachmawati Soekarnoputri: Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Sukmawati Soekarnoputri: Ketua Umum Partai Nasional Indonesia
- Guruh Soekarnoputra: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota PDI-P



**KELUARGA
SOEHARTO:**

- Soeharto: Presiden kedua Indonesia
- Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto): Anggota Partai Berkarya
- Bambang Trihatmodjo Soeharto: Anggota Partai Berkarya
- Titi Soeharto: Anggota Partai Berkarya
- Tommy Soeharto: Ketua Partai Berkarya



**KELUARGA
SBY:**

- Susilo Bambang Yudhoyono: Presiden keenam Indonesia
- Edhie Yudhoyono: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
- Agus Harimurti Yudhoyono: Ketua Umum Partai Demokrat



**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

Mengucapkan

**SELAMAT HARI JADI
KOTA SURABAYA**

Ke -



th



Adi Sutarwijono. S.IP
Ketua Dprd Kota Surabaya

Hj. Laila Mufidah. S.Ag
Wakil Ketua Dprd Kota Surabaya

Drs. A.H Thony, M.Si
Wakil Ketua Dprd Kota Surabaya

Reni Astuti. S.Si., M.PSDM
Wakil Ketua Dprd Kota Surabaya